

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan berbasis pertanian pada komunitas SAD sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan, integrasi dukungan sektoral serta penguatan yang seimbang terhadap lima aset penghidupan.

1. Implementasi intervensi pertanian mencakup pemberian akses terhadap sumber penghidupan dan pendampingan. Intervensi yang dilakukan mampu mendorong perubahan struktur penghidupan komunitas SAD.
2. Intervensi yang dilakukan telah mendorong perubahan pada lima modal penghidupan dengan perubahan yang belum merata dan menunjukkan variasi antar wilayah dengan tingkat integrasi aset yang lebih baik di Kabupaten Bungo dibandingkan Kabupaten Tebo.
3. Strategi penghidupan yang dikembangkan oleh rumah tangga SAD di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo adalah kegiatan *on-farm* yaitu perkebunan, peternakan, perikanan; *off-farm* yaitu buruh tani, berburu, meramu, mencari madu; *non-farm* yaitu jasa, *remittance*, bantuan sosial; serta strategi kontekstual yaitu membrondol sawit.
4. Capaian penghidupan SAD di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo pasca intervensi menunjukkan hasil yang parsial. Akses terhadap pangan relatif meningkat di kedua wilayah studi namun pemanfaatan pangan dan peningkatan pendapatan memperlihatkan capaian yang lebih baik di Kabupaten Bungo dibandingkan Kabupaten Tebo.
5. Model Pemberdayaan Penghidupan yang dihasilkan penelitian ini adalah model PILMA (Pemberdayaan Intensif Lima Modal) yang menekankan pentingnya keseimbangan dan integrasi penguatan lima aset penghidupan dengan intensitas dan pola pendampingan dalam mencapai keberlanjutan penghidupan.

1.2. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah dan atau pihak terkait perlu melakukan upaya pemberdayaan masyarakat SAD melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan lima modal penghidupan dan proses pendampingan sebagai satu kesatuan sistem.
2. Pemerintah dan atau pihak terkait perlu memberikan jaminan terhadap aset dan lahan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya, mengurangi kerentanan terhadap konflik lahan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan strategi penghidupan yang stabil dan berkelanjutan.
3. Diperlukan penguatan kualitas pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dan pihak terkait sebagai faktor kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset penghidupan dan mendorong transformasi strategi penghidupan masyarakat adat.
4. Pemerintah dan atau pihak terkait perlu mendukung keterlibatan SAD pada strategi *non-farm* melalui berbagai pelatihan agar SAD tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam yang semakin terbatas tetapi memiliki alternatif penghidupan yang lebih fleksibel dan resilien terhadap tekanan struktural.
5. Pada peneliti selanjutnya disarankan untuk pengujian model PILMA pada wilayah yang lebih luas untuk menguji konsistensi hubungan antara lima modal penghidupan, kualitas pendampingan dan capaian penghidupan.

1.3. Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis pertanian yang belum terintegrasi antar aset menghasilkan capaian penghidupan yang parsial dan rentan terhadap tekanan struktural. Kondisi tersebut menegaskan perlunya reformulasi kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada distribusi bantuan tetapi pada penguatan sistem penghidupan secara menyeluruh. Dengan demikian rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah :

1. Kebijakan pemberdayaan perlu direorientasikan dari pendekatan berbasis distribusi bantuan fisik menuju pendekatan transformasional berbasis keseimbangan modal

penghidupan dan pendampingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan yang dominan pada modal fisik belum mampu menghasilkan keberlanjutan penghidupan secara menyeluruh. Oleh karena itu perencanaan dan evaluasi program perlu menggunakan indikator yang mengukur perubahan struktur aset secara komprehensif sehingga intervensi yang dilakukan tidak bersifat parsial tetapi mampu memperkuat sistem penghidupan secara utuh dan berkelanjutan.

2. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman usaha dan kapasitas tenaga kerja produktif pada komunitas SAD memerlukan kebijakan afirmatif. Penguatan modal manusia menjadi fondasi utama dalam mendorong produktivitas, diversifikasi strategi penghidupan serta peningkatan kemampuan adaptif SAD dalam menghadapi tekanan struktural dan dinamika ekonomi.
3. Ketidakjelasan status lahan, tidak adanya sertifikasi kepemilikan serta keterbatasan luas lahan garapan menjadi faktor utama kerentanan penghidupan SAD. Diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian hukum atas hunian dan lahan kelola melalui percepatan sertifikasi, fasilitasi reforma agraria atau skema pengakuan wilayah kelola masyarakat adat sehingga dapat memperkuat keberlanjutan penghidupan rumah tangga SAD.
4. Kebijakan pemberdayaan perlu memastikan integrasi peran dinas teknis pertanian, penyuluh lapangan dan pendamping sosial dalam satu sistem kerja terpadu yang berkelanjutan. Pendampingan difokuskan pada peningkatan kapasitas adaptif komunitas bukan sekadar distribusi bantuan sehingga mampu mendorong transformasi penghidupan yang lebih stabil dan resilien.